INVESTIGASI: MARZUKI ALIE DI TVRI

TIPU-TIPU BAHAN MENTAH **FREEPORT**

KUHAP BARU DAN PELEMAHAN **KPK**

TEMPO

17-23 FEBRUARI 2014

#SaveRisma

Menolak proyek jalan tol, Wali Kota Surabaya itu dipasangkan dengan wakil yang tidak sehaluan. Ditanduk banteng lokal.



RP 33.000
WWW.TEMPO.CO
MAJALAH BERITA MINGGUAN
ISSN: 0126 - 4273



LAPORAN UTAMA

SIAPA MENGGASAK SURYA-1

Ditekan dari pelbagai penjuru, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini hampir menyerah. Ia dipasangkan dengan wakil wali kota yang ditentukan PDI Perjuangan tanpa konsultasi dengan dirinya. Lebih dari sekadar tak cocok, ada kepentingan bisnis di balik penetapan itu. Salah satunya: rencana pembangunan jalan tol dalam kota.

ILUSTRASI: KENDRA PARAMITA

LEMARI pakaian itu nyaris kosong. Terletak di kamar bagian dalam ruang kerja Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, tadinya lemari ini penuh dengan baju formal dan busana ganti milik Risma—sebutan akrab Tri Rismaharini. Yang tersisa hanya satu tas kecil berisi mukena dan sehelai baju dinas berwarna hitam yang digantung.

Rak sepatu di ruang 5 x 5 meter itu tak digunakannya lagi. Meja rias mulai bersaput debu halus. Di atasnya tergeletak tiga topi model tentara, dibungkus plastik bening. "Semua sudah saya *ringkesin*," kata perempuan 52 tahun itu kepada *Tempo*, yang menemuinya Rabu sore pekan lalu. "Aku sudah siap meninggalkan ruangan ini," dia menambahkan.

Risma menyatakan sama sekali tidak jadi masalah jika harus mundur. "Saya sudah memberikan semuanya," ujar satu dari tujuh kepala daerah terbaik pilihan *Tempo* 2012 ini. "Capek saya *ngurus* mereka, yang hanya memikirkan fitnah, menang-menangan, sikut-sikutan." Ketika ditanya siapa yang dimaksud dengan "mereka", ia tak menjawab.

Memimpin Kota Surabaya sejak Oktober 2010, Risma kini dilanda tekanan sejumlah kekuatan politik di ibu kota Jawa Timur itu. Tekanan pertama justru datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang mengajukannya sebagai calon wali kota tiga tahun silam. Partai ini menyorongkan Wisnu Sakti Buana, Ketua PDI Perjuangan Surabaya, sebagai wakil wali kota pengganti tanpa mendiskusikannya lebih dulu dengan Risma.

Wisnu menggantikan Bambang Dwi Hartono, politikus separtainya, yang mundur untuk menjadi calon gubernur pada Juni tahun lalu. Anggota Fraksi Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menganggap proses pemilihan Wisnu menyalahi prosedur, menolak menghadiri pelantikan. "Kalau kami datang, berarti ikut merestui," kata Su-



dirjo dari PAN, mantan sekretaris panitia pemilihan.

Kisruh bermula ketika rapat Badan Musyawarah DPRD memajukan jadwal pemilihan menjadi 6 November 2013, hari yang sama dengan pembahasan Rancangan APBD 2014. Padahal panitia sebelumnya memutuskan pemilihan baru dilakukan pada 15 November. Sidang paripurna pada 6 November yang dipimpin Wisnu gagal mencapai kuorum, yaitu dihadiri tiga perempat dari total 50 anggota.

Esoknya, tiga partai tetap menolak hadir. Pada 8 November sore, Gubernur Soekarwo cawe-cawe. Ia mengirim surat yang menurunkan syarat kuorum, menjadi cukup 50 persen plus satu. Berbekal aturan baru ini, sekitar pukul 18.10, pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya digelar dengan 32 peserta.

Tapi korespondensi antara panitia pemilihan, Gubernur Jawa Timur, dan Kementerian Dalam Negeri menunjukkan ada sesuatu yang janggal. Dalam surat 23 Desember 2013, yang menjawab surat Gubernur dua pekan sebelumnya, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan meminta prosedur pemilihan dikaji. Eddie Budi Prabowo, ketua panitia pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya, menuduh ada pemalsuan dokumen dan tanda tangan dalam berkas yang diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk keperluan pelantikan Wisnu.

Di luar soal prosedur pemilihan, dugaan politik uang muncul dalam pemilihan. Sejumlah saksi menyatakan Wisnu—anak tokoh PDI Perjuangan, Sutjipto Soedjono—mengumpulkan para anggota Dewan sehari sebelum sidang 8 November. Pertemuan dilakukan di Restoran Ria Galeria, Jalan Bangka, Surabaya. Seusai pertemuan, para anggota Dewan menenteng amplop cokelat yang—menurut seorang saksi mata—berisi masing-masing Rp 50 juta.

Ketua Partai Demokrat Surabaya Dadik Risdariyanto mengatakan hadir karena diundang koleganya dari PDI Perjuangan. Agendanya: konsolidasi mendukung Wisnu di sidang paripurna. Anggota Fraksi Partai Damai Sejahtera, Simon Lekatompessy, menyatakan tidak ada pembagian uang dalam pertemuan itu. Wisnu juga membantah membagikan duit. Yang jelas, sidang esok harinya berlangsung mulus. Wisnu dipilih secara aklamasi dalam rapat yang hanya berjalan sepuluh menit.

Risma menyatakan takut terkena imbas jika pengangkatan wakilnya bermasalah secara hukum. Ia pun meminta Kementerian Dalam Negeri menyelesaikan masalah ini. Toh, Kementerian tetap melapangkan jalan untuk pelantikan Wisnu. "Perbaikan berkas kelengkapan yang kami minta sudah dilakukan," kata Djohermansyah.

Melihat ada masalah, Risma memilih tak menghadiri pelantikan Wisnu oleh Gubernur Soekarwo di gedung Dewan pada 24 Januari. Alasan resminya: sakit. Kebetulan, dia terserang demam setelah kehujanan ketika menangani banjir pada malam sebelum pelantikan. "Tuhan memberi jalan agar saya tidak hadir pada acara itu," ujarnya. Selama sepekan setelahnya, ia pun "menghilang"—tak datang ke kantor dan absen dalam pelbagai acara. Sejak itu, luas beredar kabar Risma berniat mundur.

Dalam rentang waktu "raib" itulah *Tempo* menemuinya di suatu tempat di Surabaya pada 1 Februari lalu. Ia mengenakan jaket kargo dan jins hitam. Suaranya pelan dan serak. Sesekali ia menyandarkan kepalanya ke sandaran kursi. "Orang bilang saya pura-pura sakit, drama, agar tidak hadir ke pelantikan," katanya. "Padahal saya benar-benar sakit."

Meski begitu, ia tetap berkomunikasi dengan anak buahnya. Menggunakan *handy talky*, ia memberikan instruksi kepada petugas keamanan yang berjaga di sekitar Stadion Gelora Bung Tomo. Sore itu, Persebaya bertanding melawan Mitra Kukar, Kutai Kartanegara—yang berakhir dengan kemenangan tuan rumah. "Ini Surya-1. Tolong penonton dipecah di jalan sebelum menuju stadion agar tidak ada rombongan besar," ujarnya. Surya-1 adalah nama sandinya di radio komunikasi.

Beberapa waktu kemudian, ia melihat layar telepon seluler iPhone 5 miliknya dan terperenyak. "Komodonya mati lagi," ucapnya. Ia memencet nomor telepon, lalu memberi perintah kepada seseorang di Kebun Binatang Surabaya, tempat sejumlah binatang mati akibat konflik pengelolaan. "Laporkan ke polisi! Biar semua jelas penyebab kematiannya."

Ketika kabar Risma mundur semakin kencang, pemimpin pusat PDIP berusaha melunakkan dia. Sekretaris Jenderal Tjahjo Kumolo dan wakilnya, Hasto Kristianto, serta Ketua PDIP Jawa Timur Sirmadji Tjondro Pragolo bertamu ke tempat tinggal Risma, rumah tipe 45, di kawasan barat Surabaya. Mereka meminta Risma menghindari konflik "paling tidak sampai September"—



mungkin demi menjaga suara PDIP pada pemilihan anggota legislatif dan presiden.

Dimintai konfirmasi soal pertemuan, Sirmadji mengatakan bertamu ke rumah Risma hanya untuk membahas "persoalan kinerja". "Alhamdulillah, setelah bertemu, semua selesai," katanya.

Hampir dua pekan setelah pelantikan Wisnu, Risma akhirnya menerima wakilnya. Alih-alih menyelesaikan masalah, pertemuan pertama mereka meruncingkan persoalan. Wisnu mulai membicarakan proyek: tukar guling lapangan Bogowonto di Surabaya utara. Menurut Sekretaris Kota Surabaya Hendro Gunawan, lapangan milik TNI Angkatan Laut itu telah dilepas ke swasta. Pemilik baru ingin membangun hotel di situ. "Padahal itu jalur hijau," ujarnya.

Wisnu mengakui menyampaikan soal itu kepada Risma. Tapi, menurut dia, hal itu dilakukan atas permintaan TNI Angkat-



TEMPO/FULLY SYAFI

Wisnu Sakti Buana menerima ayam jantan dari pendukungnya seusai pengambilan sumpah dan pelantikan Wakil Wali Kota Surabaya di gedung DPRD Surabaya.

an Laut. "Saya tidak tahu lapangan itu mau dijadikan apa, tapi mereka mau membangun. Untuk itu mereka ingin bertemu dengan Bu Risma," katanya. "Kalau Bu Risma enggak mau, ya sudah."

Risma cukup sensitif terhadap pembicaraan proyek. Sebab, persoalan ini pula yang terus dia hadapi sejak awal periode pemerintahannya.

■ ■ ■

ADALAH proyek jalan tol tengah kota Surabaya yang membayangi Risma hingga kini. Sejak awal, ia menolak rencana jalan bebas hambatan sepanjang 25 kilometer itu. Di antara alasannya, "Kalau masyarakat bisa memakai jalan gratis, mengapa harus membayar?" Ia memilih melebarkan jalan lingkar luar. Mulai tahun ini, Surabaya juga akan membangun trem dan monorel sebagai transportasi publik.

Proyek jalan tol yang dirancang sejak 2006 itu awalnya dimenangi PT Margaraya Jawa Tol. Karena kesulitan dana, perusahaan itu gagal memulai proyek senilai Rp 9,2 triliun ini. Pada pertengahan 2010, di ujung pemerintahan Wali Kota Bambang D.H., Margaraya menyatakan telah membentuk konsorsium pendanaan bersama PT Jasa Marga, PT Duta Graha Indah, PT Pembangunan Perumahan, dan PT Elnusa. Mereka menyatakan siap memulai pembangunan.

Risma, yang sejak Oktober 2010 memimpin Surabaya menggantikan Bambang, membuyarkan semuanya. Ia menolak proyek yang dianggapnya tak diperlukan warga Surabaya itu. Lobi-lobi oleh pengusaha segera digencarkan untuk melunakkan sikapnya. Di antaranya menggunakan "jalur ITS"—Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, tempat Risma dulu kuliah. Direktur PT Duta Graha Indah, Dudung Purwadi, yang juga lulusan perguruan tinggi itu, dikirim buat menemui Hendro Gunawan, alumnus Teknik Sipil ITS, yang dulu menduduki kursi Ketua Badan Pembangunan Daerah Surabaya.

Hendro menceritakan, Dudung datang untuk minta tolong agar proyek jalan tol dilanjutkan. Menurut dia, tamunya lalu menyorongkan amplop tebal sebagai "tanda persahabatan". Seorang saksi mengatakan, keduanya sampai saling dorong amplop di atas meja—Hendro menolak dan Dudung berusaha tetap memberikannya. Melalui jalur lain, konsorsium ini berusaha menemui Risma untuk menyerahkan Rp 8 miliar. "Tidak pernah saya izinkan dia masuk ruangan saya," Risma menegaskan kepada *Tempo* pada Selasa pekan lalu.

Melihat gawatnya persoalan, Risma dan Hendro melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi, yang segera menurunkan tim ke Surabaya. Menurut sejumlah informasi, komisi antikorupsi menyadap komunikasi mereka yang diduga terlibat usaha penyuapan. Penyelidik malah mendapat temuan yang lebih kakap: penyuapan dan korupsi proyek Wisma Atlet SEA Games XXVI Palembang, yang juga melibatkan Duta Graha Indah. Dari sinilah terbongkar jaringan Muhammad Nazaruddin, yang ketika itu Bendahara Umum Partai Demokrat.

Dudung Purwadi, yang kini menjabat Direktur Utama Duta Graha Indah, membantah berusaha menyuap Risma dan anggota stafnya. "Sepanjang yang saya ketahui, semuanya tidak benar," katanya melalui surat elektronik kepada Rusman Paraqbueq dari *Tempo*.

Belum selesai menghadapi lobi jalan tol, Risma dihadang politikus di DPRD pada Desember 2010. Penyebabnya, ia menaikkan pajak reklame. Ia beralasan, pajak dinaikkan agar perusahaan "tidak memasang papan reklame seenaknya". Enam dari tujuh fraksi—termasuk PDIP, yang dimotori Wisnu—meminta Risma, yang belum dua bulan memimpin Surabaya, diberhentikan. Hanya Partai Keadilan Sejahtera yang menolak usul ini.

Sikap partai-partai itu berubah total ketika media massa berpihak kepada sang Wali Kota. Pemimpin partai di Jakarta memerin-

tahkan politikus mereka di DPRD Surabaya membatalkan pemakzulan. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum bahkan datang ke Surabaya, bersama antara lain Munadi Herlambang dan Nazaruddin, guna "melindungi Risma".

Menurut sejumlah sumber, Anas dan kawan-kawan mengundang Risma setelah pemakzulan yang gagal itu. Tujuannya adalah menyampaikan dukungan sekaligus menyodorkan permintaan imbal balik, yakni Risma menyetujui atau minimal tidak menolak pembangunan jalan tol tengah kota. "Bu Risma pura-pura tidak tahu dengan permintaan itu," ujar seorang saksi mata pertemuan.

Risma berkukuh menolak pembangunan jalan tol tengah kota Surabaya bahkan setelah Gubernur Soekarwo, DPRD Jawa Timur, dan DPRD Surabaya terus menekan agar proyek ini dijalankan. Akibat penolakan itu, Rencana Tata Ruang Wilayah Surabaya—dasar hukum buat rencana pembangunan—tak kunjung disahkan pemerintah pusat.

Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Surabaya Jamhadi menuduh Risma menghambat investasi. Ia menganggap pelebaran jalan dan pembangunan jalan lingkar luar kota merupakan infrastruktur pengangkutan manusia. Adapun jalan tol tengah kota merupakan infrastruktur pengangkutan barang. "Jalan tol tengah kota penting karena akan menghubungkan Waru ke Pelabuhan Tanjung Perak," katanya.

Jamhadi berharap Wisnu bisa memberi solusi tentang jalan tol tengah kota. Ia menganggap, selama ini, Risma menutup komunikasi dengan para pengusaha, termasuk tak menghadiri acara-acara Kamar Dagang. Bukan kebetulan, Jamhadi adalah Direktur Utama PT Tata Bumi Raya, perusahaan kontraktor milik Sutjipto, ayah Wisnu. Pelaku usaha di wilayah itu menyebutkan Jamhadi merupakan operator bisnis PDIP di Surabaya.

Kepada *Tempo*, Wisnu menganggap jalan tol tengah kota tetap diperlukan. Alasannya, Surabaya telah ditetapkan menjadi kota niaga. "Terserah, mau dibuat di bawah tanah biar tidak kelihatan atau ditinggikan setinggi langit. Yang penting, tol harus ada," katanya. "Kalau enggak, ya, ubah Surabaya dari kota niaga menjadi kota wisata saja."



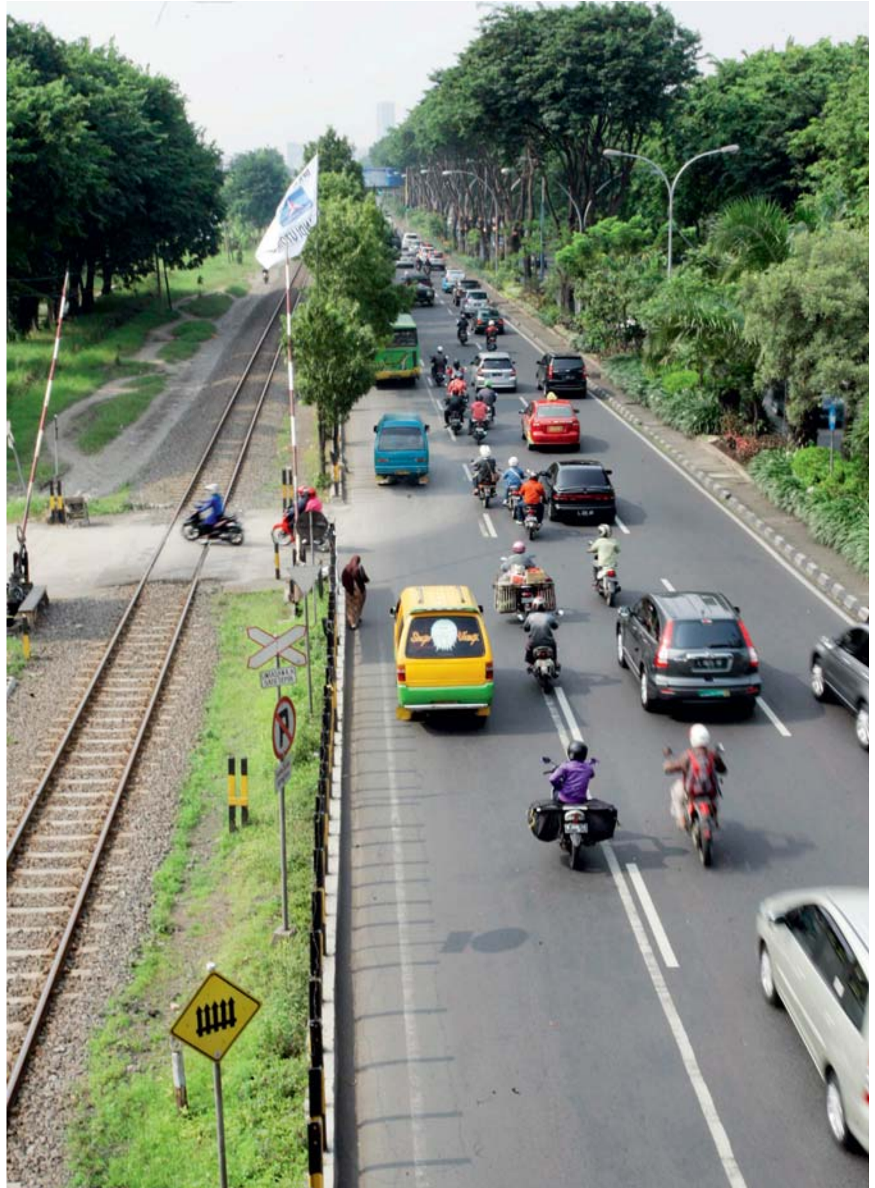
PERTARUNGAN politik di Kota Pahlawan itu belum akan berakhir. Jumat pekan lalu, panitia pemilihan wakil wali kota mengirim surat keberatan kepada Menteri Dalam Negeri. Dalam surat yang ditandatangani Ketua Eddie Budi Prabowo, Wakil Ketua Fatkur Rohman, Sekretaris Sudirjo, dan anggota Muhammad Syafei, mereka menyatakan pelantikan Wisnu Sakti memiliki banyak cacat hukum.

Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Sudan Arief mengatakan pengangkatan Wisnu bisa dibatalkan jika ditemukan pelanggaran administrasi, kesalahan prosedur, atau pelanggaran pidana selama proses pemilihan. "Prinsipnya, ketika ada kekeliruan, bisa dilakukan koreksi keputusan," katanya. Ia mengatakan memang ada masalah pada proses pemilihan Wisnu—yang baru diketahui setelah pelantikan.

Di luar gedung, pendukung Risma mulai turun ke jalan. Seratusan orang berdemonstrasi di kantor Wali Kota meminta Risma tidak mundur. Adros Ridwan, yang mengaku berasal dari Ikatan Masyarakat Madura, mengatakan akan membuat rusuh di Surabaya bila Risma mundur. Seorang ibu—perwakilan dari Fatayat NU—menegaskan, "Bu Risma harus bertahan, tidak boleh mundur."

Risma tak banyak bicara. Dia meminta pendukungnya tak bikin rusuh. Kata dia, "Insya Allah, saya bertahan. Sekarang mohon kembali ke aktivitas masing-masing. Tolong jangan repotkan Pak Polisi, kasihan." Dan Risma menambahkan, "Saya juga harus kembali bekerja. Terima kasih dukungan Bapak-Ibu."

● BUDI SETYARSO, KHAIRUL ANAM (JAKARTA), AGUS SUPRIYANTO, DEWI SUCI RAHAYU, AGITA SUKMA LISTYANTI, EDWIN FAJERIAL, KUKUH S.W. (SURABAYA)



Jalan Ahmad Yani, salah satu ruas tempat akan dibangunnya megaproyek jalan tol tengah kota di Surabaya.

TEMPO/FULLY SYAFI



TEMPO/FULLY SYAFI

PANAS-DINGIN BALAI KOTA

Risma menolak daftar berisi 80-an nama calon pejabat yang diajukan PDI Perjuangan. Partai Banteng merasa ditinggalkan.

PADA akhir 2010, tak lama setelah dilantik menjadi Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini memutasikan pegawai dalam jumlah besar. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang mencalonkan perempuan itu, mengajukan daftar berisi 80-an nama. Mereka adalah sekretaris kelurahan, lurah, dan camat yang dianggap berjasa kepada partai dan diusulkan memperoleh promosi.

Ada juga daftar nama birokrat yang dinilai mengganggu partai dan diusulkan dipindahkan dari posisinya. Adalah Wisnu Sakti Buana, Ketua PDI Perjuangan Surabaya, yang mengirimkan daftar itu. Alih-alih memenuhinya, Risma menyimpan daftar panjang itu di laci. "Kalau yang diusulkan jelek, kan, enggak mungkin diambil," kata Sekretaris Kota Surabaya Hendro Gunawan kepada *Tempo*, Kamis pekan lalu.

Sejumlah sumber menyebutkan sebagian besar nama dalam daftar tidak memenuhi standar kebutuhan yang diinginkan Risma. Sebagian bahkan menyetorkan dana agar bisa masuk daftar—jumlahnya tergantung posisi yang diinginkan. Walhasil, setelah Risma menolak hampir semua nama, hubungannya dengan PDIP segera memburuk. Apalagi sejumlah pejabat yang dinilai berjasa bagi partai itu malah digeser ke tempat lain. Kabar adanya intervensi pada mutasi itu rupanya sampai ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Wisnu Sakti pun dipanggil ke Jakarta.

Wisnu, yang bulan lalu dilantik menjadi wakil wali kota, mengakui mengirimkan usul nama-nama calon pejabat. Namun, menurut dia, hal itu dilakukan atas permintaan Risma. Menurut anak bungsu tokoh PDIP Sutjipto Soedjono ini, Risma meminta usul PDIP sebagai satu-satunya partai pengusung dia, yang ketika itu berpasangan dengan Bambang D.H.

Ia menuturkan, tawaran disampaikan Risma seusai pelantikannya di gedung DPRD Surabaya. Wisnu, yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Surabaya, segera menggelar rapat pengurus PDIP untuk menyusun masukan. Tak butuh waktu lama, deretan nama birokrat yang dekat dengan partai berlambang banteng moncong putih itu diserahkan kepada Risma.

Setelah daftar diserahkan, kata Wisnu, tak kunjung datang undangan pembahasan dari Risma. "Tahu-tahu para pejabat baru sudah dilantik," ujarnya. Pria 40 tahun ini tambah kesal karena panggilan telepon tak dijawab, begitu pula kiriman pesan pendek. Penjelasan tentang alasan sebagian usul ditolak dan beberapa pejabat dimutasikan ke posisi yang tak dikehendaki pun tak diperoleh.

Seorang pejabat Kota Surabaya menceritakan, setengah dari daftar usul PDIP Surabaya dicoret Risma. Ia menjelaskan, partai memang diminta memberi usul tentang para pejabat yang layak dipromosikan. Namun keputusan akhir tetap di ta-



ANTARA/M. RISYAL HIDAYAT

Wisnu Sakti Buana (kiri).

Tri Rismaharini bersama Bambang D.H. dan Wisnu Sakti Buana saat deklarasi Wali Kota Surabaya, 2010.

ngan Risma.

Menurut sumber *Tempo* yang lain, Wisnu diduga "menanam" kaki tangan di kantor Wali Kota Risma. Pernah suatu ketika orang itu ketahuan memalsukan dokumen perizinan gara-gara sistem administrasi berjalan dengan baik. Pada saat itu, Wisnu masih menjabat Wakil Ketua DPRD. "Bagaimana setelah menjadi wakil wali kota?" kata si sumber, awal Februari lalu.

Risma tak mau mengungkapkan konflik seputar usul mutasi pejabat. Ia tak mau menjelaskan tekanan petinggi PDIP Surabaya untuk mengegolkan keinginannya. "Capek *ngurusi* orang-orang kayak *gitu*. *Mikir*-nya cuma fitnah, menang-menangan, *nyikut* orang lain," ujarnya kepada *Tempo* di Balai Kota, Kamis pekan lalu. Sebelumnya, ia menyatakan hanya ingin mengurusi masyarakat Surabaya dan tak mau larut ke persoalan tekanan elite partai.

Menurut Wisnu, konflik Risma dengan PDIP akibat kebuntuan komunikasi. Ia juga mengakui ketidakharmonisan itu mendorong usul hak interpelasi DPRD kepada Risma tentang peraturan pajak reklame. Hak interpelasi menjelma menjadi tuntutan pemakzulan Risma pada awal pemerintahannya.

Gerilya menggergaji Risma itu dilakukan Wisnu Sakti dengan menggandeng Ketua DPRD Wisnu Wardana, yang juga Ketua Partai Demokrat Surabaya. Keduanya bekerja sama menggalang pemakzulan Risma. Pada hari-hari terakhir, setelah media massa berpihak kepada Risma, petinggi-petinggi partai di Jakarta ternyata berubah pikiran.

Pada waktu itu, pengurus pusat PDIP memanggil para pengurus cabang Surabaya. Risma dan Bambang juga hadir dalam pertemuan yang dipimpin Megawati dan Sekretaris Jenderal Tjahjo Kumolo. Kedua pihak diminta menghentikan konflik. Setelah pertemuan itu, tensi hubungan Risma dan PDIP Surabaya turun. Begitu juga hubungan Balai Kota dengan DPRD. "Sekarang hubungan kami juga sudah baik," kata Wisnu.

Ketua PDIP Djarot Saiful Hidayat menjamin Wisnu, yang menduduki posisi baru, tak akan menggerus kewenangan Risma, termasuk dalam penempatan dan promosi pejabat. "Semua keputusan tetap berada di tangan Bu Risma," tuturnya.

Politikus Partai Banteng ternyata juga mengeluhkan Risma yang dianggap tidak mau memenuhi permintaan pembangunan dari konstituen mereka. Seorang pejabat partai mencontohkan, pada waktu kampanye, kader-kader PDIP melempar janji-janji untuk membangun wilayah itu. Tujuannya agar mereka mau memilih Risma-Bambang.

Kenyataannya, menurut anggota Dewan itu, Risma tak kunjung memenuhi janji tersebut. Akibatnya, kata dia, banyak konstituen melampiaskan kemarahan dengan memaki-maki pejabat partai. Misalnya, pengurus anak cabang ditagih masyarakat agar menyediakan *paving block*, membangun penerangan jalan umum, membuat bak sampah, atau mengadakan gerobak. Permintaan PDIP agar dibantu Balai Kota tak ditanggapi maksimal. "Kami sendirian menghadapi tagihan-tagihan itu," kata politikus ini.

Dimintai komentar soal itu, Risma mengatakan tidak pernah melempar janji-janji proyek selama kampanye. Sejak awal, ia mengaku tidak akan membayar pemilih. "Mereka juga tahu saya tidak punya uang," ujarnya. Meski begitu, ia mengatakan pemerintahannya telah banyak membantu masyarakat kecil, basis utama PDIP.

● JOBPIE SUGIHARTO, KHAIRUL ANAM (JAKARTA), AGUS SUPRIYANTO, AGITA SUKMA LISTYANTI, EDWIN FAJERIAL, DEWI SUCI RAHAYU, ENDRI KURNIAWATI (SURABAYA)

SETELAH IA MENJUAL SAWAH

Risma lahir dari kebekuan politik di Surabaya. Menolak disandera uang.

MEDIO September 2009, PDI Perjuangan Kota Surabaya menggelar Rapat Kerja Cabang Khusus di Hotel Veni Vidi Vici, di dekat Tugu Pahlawan. Pertemuan itu dilakukan untuk menjaring dan mengusulkan calon dalam pemilihan Wali Kota Surabaya 2010. Suasana hati kader partai sebenarnya sedang tak enak: baru beberapa bulan berselang, calon mereka gagal dalam pemilu presiden 2009. Partai juga *keok* dalam pemilu legislatif.

Pengurus tak solid karena ragu apakah Bambang Dwi Hartono, kader PDIP paling senior di Surabaya, bisa diajukan lagi sebagai calon wali kota. Sebelumnya, Bambang adalah Wali Kota Surabaya 2005-2010. Lima tahun sebelum itu, Bambang wakil wali kota mendampingi Sunarto. Ketika Sunarto dimakzulkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bambang naik pangkat. Ia menjadi wali kota pengganti pada 2002-2005. Undang-undang membatasi wali kota hanya bisa menjabat dua periode.

Rapat kemudian merekomendasikan tiga nama: Bambang D.H., Ketua Cabang PDIP Saleh Mukadar, dan Wisnu Sakti Buana. Yang terakhir adalah Wakil Ketua Cabang PDIP Kota Pahlawan. Dua nama pertama disiapkan sebagai calon wali kota dan Wisnu sebagai calon wakil wali kota. Untuk melapangkan jalan Bambang, PDIP mengajukan permohonan uji materi Pasal 58 Undang-Undang Pemerintah Daerah tentang pembatasan masa jabatan wali kota ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah belakangan tak menyetujui permohonan itu.

Bambang gagal maju, PDIP mengajukan Saleh Mukadar sebagai calon. Bambang diposisikan sebagai wakil—sesuatu yang tak melanggar undang-undang. Nama pasangan ini diajukan ke PDIP pusat untuk mendapatkan rekomendasi. Banteng Surabaya bahkan mendeklarasikan keduanya dan mempopulerkan *tagline* SBY–Saleh Bambang Yes.

Tapi strategi "mendompleng" kepopuleran SBY ditanggapi sinis sebagian kader, termasuk Wisnu Sakti Buana. "Saya enggak setuju. Seperti menjual harga diri partai," kata Wisnu, Rabu pekan lalu. "Apalagi tulisan SBY diwarnai biru."

Dalam sejumlah survei, elektabilitas Saleh-Bambang hanya tujuh persen—jauh di bawah angka kandidat lain. Wisnu, yang tak dicalonkan PDIP, mencibir. Di PDIP, konflik Saleh dan Wisnu membara seperti api dalam sekam.

Di tengah kebuntuan, muncul nama Tri Rismaharini. Ia disorongkan Jagad Hariseno, putra sulung tokoh PDIP, Sutjipto Soedjono. Meski bukan pengurus partai, Seno cepat mengkonsolidasi dukungan. Restu sang ayah memudahkannya bergerak. Dibantu Baktiono, Armuji, Don Rosano, dan kader PDIP muda lainnya, Seno wira-wiri ke Jakarta mempromosikan Risma.

Tak berapa lama, restu Megawati Soekarnoputri turun: Risma diminta berduet dengan Bambang, yang sudah lebih dulu diberi lampu hijau. "Risma adalah orang yang paling paham konsep pembangunan Surabaya sejak jabatan wali kota dipegang Bambang D.H.," ujar Ketua PDIP Djarot Saiful Hidayat menjelaskan alasan partainya memilih Risma.

Awalnya, Risma ogah-ogahan maju ke pemilihan. "Aku tak pernah minta, tak pernah berani berdoa jadi wali kota," kata perempuan yang kini 52 tahun itu. Tapi, setelah dirayu orang-orang di sekelilingnya, Risma mengangguk. Syaratnya, ia tak ingin disebut "melamar" atau "dilamar" sebagai calon wali kota PDIP.

Menurut Seno, adalah Don Rosano dan bos *Radio Suara Surabaya*, Wahyu Widodo, yang mendekatkan PDIP dengan Risma. "Memperbaiki kota ini tak cukup dengan



Anggota panitia pemungutan suara pemilihan calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Surabaya, Agustus 2010.



ANTARA/M RISYAL HIDAYAT, NBL.ID (AZRUL)



"Aku tak pernah minta, tak pernah berani berdoa jadi wali kota," kata perempuan yang kini 52 tahun itu. Tapi, setelah dirayu orang-orang di sekelilingnya, Risma mengangguk. Syaratnya, ia tak ingin disebut "melamar" atau "dilamar" sebagai calon wali kota PDIP.

orang baik. Peran pejabat publik yang baik sangat penting," ujar Don.

Selain mereka, **Azrul Ananda**, anak bos Jawa Pos Group, Dahlan Iskan, ikut mendukung. PDIP menyambut baik "uluran" itu karena ada sinyalemen Jawa Pos akan mendukung PDIP kalau Risma diusung. Azrul dan kawan-kawan bergerak di media, Seno cs bergerak di partai.

Seseorang yang dekat dengan Risma menuturkan pencetus utama pencalonan Risma sebenarnya Dahlan Iskan. Wartawan itu jatuh cinta melihat kinerja Risma di Balai Kota. Arif Afandi, bekas wartawan *Jawa Pos*, yang sudah mendapat tiket dari Partai Demokrat, juga *ngebet* menjadikan Risma calon wakil. "Benar, dulu saya pernah melamar Bu Risma. Waktu itu dijawab 'terserah Allah'. Artinya belum memastikan. Eh, tidak berapa lama, dia dipasangkan dengan Bambang D.H.," ujar Arif kepada *Tempo*, Ahad dua pekan lalu.

Arif belakangan berduet dengan Adis Kadir (Golkar). Dalam pemilu, selisih suara mereka tipis: Risma menang di 16 kecamatan dan Arif di 15 kecamatan. Risma-Bambang, yang dicalonkan PDIP—partai dengan modal suara pas-pasan (15 persen suara pemilu legislatif)—bisa menundukkan koalisi raksasa yang dimotori Demokrat dan Golkar.

Dahlan Iskan mengaku ikut mendorong Risma maju sebagai Wali Kota Surabaya. "Semua orang tahu itu," katanya Kamis pekan lalu. Dukungan itu dimanifestasikan dalam bentuk dukungan pemberitaan di media kelompok *Jawa Pos*. Dahlan membantah menginstruksikan jajaran redaksi secara besar-besaran memberitakan Risma. "Instruksi saya cuma satu, mencari wali kota yang bisa membuat Surabaya maju," ujarnya.

Setelah rekomendasi partai didapat, masalah berikutnya adalah dana kampanye. Ditanyai PDIP, Risma menjawab hanya punya uang Rp 70 juta hasil menjual sawah. Dua kali Risma menelepon pengurus partai agar tak memaksakan pencalonan. Tapi ia diminta jalan terus.

Belakangan, para bohir menghampirinya. Suatu hari ada utusan dari Jakarta menemui Risma menawarkan Rp 60 miliar sebagai dana kampanye. Syaratnya, Risma menandatangani surat permintaan. Tak mau tersandera, Risma menolak tawaran tersebut. "Kenapa harus dipaksakan menang, *wong* enggak menang *aja* enggak apa-apa," ujarnya.

Gagal pada penawaran pertama, utusan PDIP menawarkan bantuan yang sama. Syaratnya pun mirip: Risma hanya diminta menandatangani surat permintaan bantuan. Anehnya, angka nominal yang disebutkan pun sama: Rp 60 miliar. Risma kembali menolak. Jagad Hariseno mengaku membawa pesan dari "kelompok nasionalis" untuk mengulurkan tangan. Syaratnya, Risma harus komit kepada PDIP—upaya mengikat "loyalitas" Risma, tokoh yang tak lahir dari rahim Banteng.

Merasa ditekan, Risma pingsan. Belakangan, Seno menyangkal mendesak sang calon wali kota. "Mungkin dia pikir aku ini *dodolan nang* kelompok broker agar bisa mengikat dia," ujar Seno. "Padahal bukan begitu."

Risma menolak tawaran itu. Ia memang tegas mengharamkan uang untuk kepentingan politik. Pernah suatu hari, saat kampanye, warga setempat menanyakan "amplop". Bukannya memberi, Risma marah-marah, lantas meninggalkan arena. "Aku punya keyakinan bahwa pemimpin tidak boleh beli jabatan."

Satu hal lagi: Risma tak mau jadi anggota partai. Beruntung, Megawati memahaminya. "Jangan tanya kartu tanda anggota ke Mbak Risma," kata Megawati kepada pengurus PDIP seperti ditirukan Risma. Ia tak risau disebut "anak kos" di kandang banteng moncong putih.

● AGUS SUPRIYANTO, DEWI SUCI RAHAYU, AGITA SUKMA LISTYANTI, EDWIN FAJERIAL, ENDRI KURNIAWATI (SURABAYA), BUDI SETYARSO, KHAIRUL ANAM (JAKARTA)



TEMPO/STR/ARIS NOVIA HIDAYAT

WALI KOTA DENGAN SEBUAH RADIO

Surabaya berubah total sejak dipimpin Tri Rismaharini. Ia memantau proyek hingga ke mandornya.

DI radio *handy talky* milik Kepala Dinas Pekerjaan Umum Surabaya Erna Purnawati, suara cempreng Tri Rismaharini terdengar bercakap dengan seorang penjaga pintu air. Wali Kota Surabaya itu bertanya apakah pengerukan sungai sudah rampung. "Cepat diselesaikan, ya, Pak," kata Risma dalam bahasa *Suroboyoan*.

Erna, saat sedang berbicara kepada *Tempo* pada Kamis pekan lalu, menghentikan wawancara begitu suara khas Risma terdengar di saluran radio itu. Ia menyimak pembicaraan bosnya dengan para penjaga pintu air di seluruh Surabaya. "Setiap hari Bu Wali Kota mengecek detail seperti itu," ujarnya.

Menurut Erna, Risma hafal nama-nama penjaga pintu air serta masalah di tiap titik dan jadwal buka-tutupnya. Di musim hujan seperti sekarang, buka-tutup pintu air mesti terjaga dengan tertib agar air dari tiga sungai yang membelah kota tak membeludak. Soalnya, Sungai Kalimas dan Wonokromo berfungsi sebagai drainase ke laut di Pelabuhan Tanjung Perak dan ke timur di Selat Madura. Sedangkan Kali Surabaya berfungsi sebagai penyedia air untuk perusahaan daerah air minum.

Selain tertib buka-tutup pintu, sungai-sungai di Surabaya rutin dikeruk. "Tak ada hari tanpa mengeruk saluran," kata Erna. Pengerukan dilakukan hingga ke Laut Jawa atau Selat Madura. Sejak Risma menjabat wali kota pada September 2010, ada 23 alat berat—dari hanya dua di zaman wali kota sebelumnya—yang mengeruk tanah dan sampah di saluran-saluran air dan sungai. "Giginya sudah rompal-rompal," ujar Erna.

Untuk menghindari kekeringan di musim kemarau, pintu-pintu terakhir dekat laut ditutup sehingga air dari tiga sungai besar itu mengalir ke saluran yang tersebar di seluruh kota. Penutupan pintu sungai juga membuat air laut tak bisa masuk. Dengan cara ini, Surabaya tak banjir saat hujan dan tak kering ketika kemarau. Sumber air PDAM dan air untuk menyiram tanaman kota selalu tersedia.

Pengecekan hingga ke lapangan secara mendetail sudah dilakukan Risma sejak menjabat Kepala Bagian Bina Bangunan pada 2002. Ia kerap terlihat ada di pintu-pintu air pada pukul dua dinihari saat hujan, membawa roti untuk para penjaga itu. Waktu itu, sungai tak dikeruk secara rutin sehingga airnya luber saat *rendheng* karena dangkal. Ini yang membuat Risma membeli 23 *backhoe* ketika menjabat wali kota.

Risma terkenal sebagai wali kota yang berhasil menata wajah ibu kota Jawa Timur ini. Surabaya yang panas menjadi sejuk ka-

Tri Rismaharani melakukan inspeksi mendadak terkait dengan kelayakan fasilitas perkantoran pemerintahan di Surabaya.

Jalur pedestrian di Jalan Embong Malang, Surabaya.

rena ada sembilan jalur hijau dan 54 taman plus delapan hutan kota. Tahun ini, jumlah taman akan ditambah di 46 titik, dan 270 taman pasif diaktifkan. Pembangunan taman-taman itu sudah dijalankan Risma sejak ia menjabat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan pada 2010.

Setiap taman kota punya tema, seperti Taman Lansia, Taman Persahabatan, dan Taman Ekspresi. Di taman-taman itu, selain tersedia jaringan Internet gratis, ada perpustakaan umum. Untuk membangun hutan kota, Risma membuat program Sajisapo atau "satu jiwa satu pohon". Ketika ia membangun hutan Balasklumprik dan Pakal, ada 5.000 orang yang datang membawa pelbagai jenis pohon.

Selain menghijaukan kota, Risma menata jalan-jalan hingga jalur pedestriannya. Suatu kali, pada 2010, Risma pergi umrah ke Mekah bersama suaminya. Wali Kota Bambang Dwi Hartono, yang telah dua periode memimpin Surabaya dan kemudian "turun pangkat" menjadi wakilnya, menelepon menagih gambar jalur pedestrian yang sesuai dengan lebar jalan agar tak terendam banjir. Banyak warga kota celaka karena terperosok di trotoar yang tergerus air.

Di depan Mekah itu, sarjana arsitektur Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya ini membuat gambar desain trotoar dan mengirimnya via surat elektronik ke Bambang. Rupanya, meski setuju dengan konsep Risma, Bambang cemas terhadap dampak setelah trotoar jadi bagus karena akan dibanjiri pedagang kaki lima. "Saya bilang tak apa daripada pedagang itu pindah mengotori taman," kata Risma.

Mendahulukan kepentingan manusia seraya merawat kerapian kota adalah ciri khas manajemen pemerintahan Risma. Ketika ia menjabat Kepala Bagian Bina Bangunan pada 2002, ia mulai membuat konsep rumah singgah untuk menampung pengemis dan gelandangan. Seorang pejabat menuturkan Risma membangun banyak rumah singgah untuk menampung mereka yang tak punya tempat tinggal. Rumah singgah terus diperbanyak ketika ia menjabat wali kota.

Jika sedang berkeliling lalu melihat pengemis atau anak imbesil, Risma mengangkut dan menempatkan mereka ke rumah singgah terdekat. Ide itu, menurut pejabat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, datang langsung dari Risma sendiri. Ia pula yang mengusulkan dan memutuskan tempat, jumlah, serta bentuk rumah singgahnya. "Sampai warna keramik, dia yang memutuskan," ujar pejabat yang menolak dipublikasikan namanya ini.

Untuk memberdayakan orang miskin, Risma membuka pelatihan pelbagai jenis usaha. Orang miskin Surabaya didata dan dipilah sesuai dengan masa produktivitas dan minatnya. Setelah dinyatakan lulus pelatihan, mereka ditampung di koperasi atau dibuatkan stan di mal-mal. Pemerintah kota menanggung pajak dan biaya serta modalnya. "Hampir di semua mal ada stan binaan pemerintah," kata pejabat itu.

Mereka yang gagal di satu jenis usaha akan disalurkan ke usaha lain sampai berhasil mendapat untung dan penghasilan tetap. Risma memantau langsung perkembangan setiap orang yang dibina pemerintah kota ini. Ia bisa hafal pendapatan tukang jahit atau pembuat kue sehari. Jika penghasilan mereka stagnan, Risma meminta pejabat di Bina Program membimbingnya menciptakan inovasi baru.

Dari seluruh program menata kota, satu yang belum terlihat tuntas adalah mengurai kemacetan. Dengan satu juta mobil dan tiga juta sepeda motor, 2.102 kilometer panjang jalan Surabaya tak bisa menampungnya. Macet di mana-mana, terutama di jam sibuk pada pagi dan sore hari. Dengan ekonomi yang tumbuh dari 5 persen di zaman Bambang D.H. dan kini 7 persen, plus inflasi hanya 4 persen, warga Surabaya membelanjakan uangnya dengan membeli kendaraan.

Pertumbuhan ekonomi dan kendaraan itu tak diimbangi pertambahan ruas dan panjang jalan. Risma sadar kota bisa *mampet* jika kemacetan tak segera diurai. Maka ia merancang jalur lingkar barat dan timur yang mengelilingi Surabaya untuk memecah kemacetan di tengah kota. Rencana ini tak terlalu mulus karena terbentur pembebasan lahan.



Risma menolak rencana pembangunan jalan tol yang membelah kota dan bersambung ke jalan tol Trans Jawa hingga Jakarta. Bagi Risma, jalan tol bukan solusi kemacetan karena pintu keluar-masuknya tak banyak. Ia mencontohkan kota-kota di luar negeri yang memperbanyak perempatan, bukan tol, agar makin banyak jalur alternatif ketika lalu lintas macet.

Jalan tol juga akan mengubah tata ruang kota yang sudah dibangunnya. Taman-taman yang terlewati bakal terbongkar. Belum lagi rumah-rumah penduduk. "Pembangunan itu untuk menyejahterakan masyarakat," kata Risma. "Kalau malah tidak sejahtera, apa itu masih disebut membangun?"

BAGJA HIDAYAT, DEWI SUCI RAHAYU (SURABAYA)

TEMPO/FULLY SYAFI



TEMPO/FULLY SYAFI

TRI RISMAHARINI:

INI BUKAN SOAL WAKIL WALI KOTA

SUARA keras Tri Rismaharini menenangkan suara di ujung telepon. "*Uwis tah*, saya tidak mundur. Bubarkan teman-temanmu itu...," kata Wali Kota Surabaya ini, Selasa siang pekan lalu. Seorang pendukung utamanya di ujung telepon baru saja memberitahukan, massa telah berkumpul karena mendengar Risma memutuskan mundur dari jabatan wali kota periode 2010-2015.

Wawancara dengan *Tempo* terhenti karena telepon tadi. Dan itu tidak hanya sekali, terutama setelah beredar kabar Risma bakal meninggalkan jabatannya. Hal ini muncul setelah terjadi konflik akibat pemilihan wakil wali kota pengganti Bambang D.H., yang mundur tahun lalu untuk menjadi calon Wakil Gubernur Jawa Timur. Tanpa berkonsultasi dengan Risma, PDI Perjuangan memunculkan Wisnu Sakti Buana.

Selasa siang pekan lalu, Risma berbincang dengan Budi Setyarso dan Jobpie Sugiharto dari *Tempo*. Perempuan penerima sejumlah penghargaan internasional bidang perkotaan ini membeberkan banyak cerita, yang sebagian tidak bisa dipublikasikan. Wartawan *Tempo* Dewi Suci Rahayu melanjutkan wawancara di ruang kerja Risma, sehari setelahnya.

Apakah benar Anda akan mundur?

Nanti dilihat dulu. Saya pasti akan minta petunjuk dari Tuhan, salat istikharah dululah.

Mengapa?

Sebab, saya diingatkan oleh seseorang tentang kisah Nabi Yunus, yang meninggalkan umatnya lalu dihukum Tuhan. Saya bertanya: kalau saya mundur, apakah berarti saya meninggalkan rakyat?

Kenapa Anda berpikir untuk mundur?

Kalau yang dipikirkan hanya menang dan kalah, ya, sudah saya serahkan sekalian jabatan ini. Saya memang takut pertanggungjawaban terhadap rakyat. Saya kan tak pernah minta, tak pernah berani berdoa untuk menjadi wali kota.

Anda mempersoalkan penetapan wakil wali kota. Bukankah itu jabatan yang tak menentukan?

Sebetulnya bukan permasalahan wakil wali kotanya siapa. Karena saya selalu patuh pada aturan.

Pemilihan wakil wali kota ini tidak sesuai dengan aturan?

Mohon maaf, ya. Kadang-kadang saya begini: ya sudah saya serahkan. Saya *ndak* beban itu jabatan. Saya serahkan sekalian. Hanya, saya mempertimbangkan umat, sesuatu yang paling saya takutkan.

Ya, kemarin kan diprotes itu. Makanya kita lihat hasilnya, Kementerian Dalam Negeri seperti apa. Saya juga tidak pingin nanti imbasnya ke saya. Orang bisa bilang Bu Risma ini cerewet, *nurut* banget pada aturan, atau sok suci. Sebenarnya kan bukan. Saya pingin *selamet* saja.

Bagaimana Anda sempat memikirkan mundur?

Mohon maaf, ya. Kadang-kadang saya begini: ya sudah saya serahkan. Saya *ndak* beban itu jabatan. Saya serahkan sekalian. Hanya, saya mempertimbangkan umat, sesuatu yang paling saya takutkan.

Seberat apa sih tekanannya sehingga Anda hampir menyerah?

Ya, banyak. Cuma, saya tidak mau mendetailkan. Kalau memang diminta jabatan ini, ya iya saya *ndak* keberatan....

Seberapa lama dan intens sih pengajuan nama calon?

Terus terang saya tak tahu prosesnya. Tapi ya sudahlah kalau itu bagian dari mekanisme partai. *Ndak* tahu saya.

Bukankah surat pencalonannya melalui Anda?

Saya hanya melanjutkan surat dari Dewan Pimpinan Pusat PDIP ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ini bukan domain saya. Kalau prosesnya benar, saya percaya pasti bisa melaluinya. Karena ini enggak *bener*, saya jadi takut.

Anda tak bisa menawar soal calon wakil wali kota?

Pasti diskusi. Cuma, ya sudahlah, ini jalan Tuhan. Ya sudah, saya ikuti. Dan ini memang ranah PDIP.

Anda dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati. Mengapa tidak mengadukan soal ini kepada dia?

Bu Mega sebetulnya mau datang. Tapi dia meminta Pak Tjahjo (Sekretaris Jenderal Tjahjo Kumolo) datang ke rumah saya. Kalau cuma menghadapi DPRD, itu enggak sulit, karena saya percaya jabatan itu Tuhan yang *ngatur*. Kalau sekarang diberhentikan, saya siap....

Semestinya Anda melawan tekanan....

Terus terang, saya *ndak* bisa baca politik. Saya sangat percaya terhadap omongan orang, kecuali saya sudah tahu *track record*-nya. Memang ini kehormatan saya. Karena mendengar Kementerian Dalam Negeri tak melakukan apa pun, saya sangat terpukul.

Tekanan itu berhubungan dengan rencana jalan tol tengah kota yang terus Anda tolak?

Mungkin.

Benarkah, karena jalan tol tak dibangun, investasi di Surabaya turun?

Pertumbuhan ekonomi pada waktu Pak Bambang (wali kota sebelumnya) cuma lima persen, zaman saya langsung naik jadi tujuh persen. Inflasi cuma empat persen setahun, padahal kota perdagangan dan jasa. Sampai banyak yang heran mana bisa pertumbuhan naik empat persen setahun. Itu luar biasa.

Akibat penolakan jalan tol, rencana tata ruang wilayah tak kunjung disahkan?

Tidak ada masalah karena kami memakai rencana 2007, investor tetap masuk. Kendalanya cuma soal jalan tol. Kalau kita setuju, ya jadi.

Mengapa Anda berkeras menolak?

Pertama, kalau masyarakat bisa gratis memakai jalan, kenapa harus bayar? Kedua, dengan jalan tol, hanya orang tertentu yang bisa lewat. Ketiga, menurut teori kota, menambah panjang jalan itu ada batasnya. Suatu saat pasti tidak mungkin lagi dilakukan. Solusinya, bagaimana memberikan sistem transportasi massal yang bagus. Keempat, kalau jalan tol dibangun melayang di atas, properti di sekitarnya pasti akan mati. Kelima, kaki-kaki jalan tol akan membuat banjir.

Anda akan membangun transportasi publik?

Trem. Tahun ini sudah tender. Sudah studi kelayakan. Sudah semua. Kan, sudah kami klarifikasi, tinggal mengumumkan. Pemerintah pusat mau membiayai dengan APBN.

Berapa lama pengerjaannya?

Dua tahun paling lama. Saya minta satu setengah tahun selesai.

Berarti tahun depan harus mencalonkan diri lagi untuk meneruskan proyek itu?

Udah capek, he-he-he....

Kapok dengan PDIP?

Ndak. Sebetulnya orang di atasnya baik. Sebetulnya kebanyakan orang PDIP adalah orang yang enggak mampu, dan saya bisa banyak menolong mereka. Mereka bisa mendapat kerjaan. Saya juga bisa menolong banyak usaha mereka.

Apa prestasi terbesar Anda?

Enggak ada. Tapi pekerjaan yang terberat itu membuat sistem pengadaan elektronik, *e-procurement*. Tidak cuma didemo, saya juga diancam dibunuh. Saya bilang, enggak apa-apa *wis*, pulang jam dua malam atau harus mati. Aku ikhlas. *E-proc* jelas menguntungkan kita, efisiensi sampai 20-30 persen. Pengadaan barang bisa lebih dari 50 persen. Mengurangi korupsi juga.

Berapa lama Anda membuat sistem itu?

Ketika bikin *e-proc budgeting*, aku *nginep* enam bulan di kantor. Natalan, tahun baru, Idul Adha, aku di kantor.

Anda tidak aktif berkomunikasi dengan masyarakat menggunakan media sosial?

Waktu habis untuk bekerja, enggak sempat begitu-begitu. Toh, kami punya *media center*, bisa *curhat* di sana secara resmi. Kalau mau eksis di media sosial, apa sih yang dicari? *Nguber* jabatan? *Nyalon* lagi? ●